TAJUK RENCANA

Babak Baru Perburuan Harun Masiku

JUDUL di atas terasa membawa harapan baru dalam pencarian buron kasus suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024, Harun Masiku. Ada optimisme bahwa perburuan selama hampir lima tahun itu akan membuakan hasil. Apalagi, sudah banyak saksi yang diperiksa terkait kasus yang menghebohkan jagat politik Tanah Air ini. Belakangan, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly juga akan diperiksa penyidik KPK terkait kaburnya kader PDI Perjuangan itu. Yasonna Laoly sendiri juga merupakan kader PDI Perjuangan.

Adalah mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang menyebut perburuan terhadap Harun Masiku merupakan babak baru. Karena sebelumnya sempat vakum usai pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus yang sama. Kini, penyidik di bawah pimpinan AKBP Rossa Purbo Bekti, KPK kembali menggeliat untuk mengejar tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU itu (KR 14/12). Benarkah ini babak baru ? Harapannya demikian.

Atau, adakah ëtangan-tanganí tak nampak yang melindungi Harun Masiku, sehingga sulit untuk ditangkap ? Nampaknya pertanyaan ini sangat relevan mengingat sudah beberapa kali yang bersangkutan terdeteksi keberadaannya, namun gagal ditangkap. Bahkan, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika beberapa hari lalu mengatakan posisi Harun Masiku berada di tempat yang masih bisa dipantau. Sayangnya, ia tidak menjelaskan secara detail pernyataan tersebut, apakah berada di dalam negeri atau luar negeri. Takutnya, menurut Tessa, hal itu dapat mengganggu proses pencarian yang bersangkutan.

Kita mengakui banyak kejanggalan dalam kasus Harun Masiku, antara lain saat penangkapan atau OTT KPK yang dilakukan pada 8 Januari 2000, dari empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya Harun Masiku yang lolos. Tiga orang yang ditangkap saat itu dan kini telah dijatuhi hukuman adalah Wahyu Setiawan (komisioner KPU), Agustiani Tio Fridaelina, orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang juga mantan anggota Bawaslu dan seorang lagi dari swasta, Saeful. Disebut-sebut Harun Masiku sempat pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum OTT. Namun berdasar rekaman CCTV di bandara, Harun tercatat sudah kembali ke Tanah Air pada 7 Januari 2020.

Pada 2020 itulah nama Harun Masiku masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dan sejak saat itu yang bersangkutan tak pernah nongol. Dari rangkaian peristiwa tersebut wajar bila kemudian muncul pertanyaan, adakah tangan-tangan tak tampak yang melindungi Harun Masiku. Dalam konteks itu pula kita melihat relevansi pemanggilan Yasonna Laoly yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM era Presiden Jokowi. Ia dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi atas kasus Harun Masiku. Kita yakin banyak hal yang patut dipertanyakan terkait kaburnya Harun, apalagi disebut-sebut kabur ke Singapura dan kembali Indonesia, namun tak bisa ditangkap.

Meski demikian, kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam proses pemanggilan Yasonna Laoly. Kita hanya mengharapkan Harun Masiku segera bisa ditangkap dan membongkar semua yang terlibat dalam kasus suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2020. ❑-d

Krisis Moral Remaja

Hamdan Daulay

MASYARAKAT saat ini kian resah menghadapi maraknya narkoba dan situs-situs porno di internet. Sebab efek negatif dari penyakit masyarakat ini telah banyak membuat kerusakan moral yang luar biasa. Banyak kaum remaja yang mengkonsumsi narkoba dan situs porno terjerumus pada praktrek seks bebas. Fenomena ini sungguh sangat memprihatinkan dalam perkembangan generasi bangsa ke depan. Tidak hanya para orangtua yang resah dengan maraknya narkoba dan pornografi, namun juga tokoh agama dan juga pemerintah, merasakan keprihatinan yang sama. Bagaimana nanti masa depan putra-putri bangsa ini kalau banyak yang dilanda krisis moral yang memprihatinkan.

Selain pornografi, penyakit narkoba juga tak kalah dahsyatnya menimpa masyarakat saat ini. Bahkan pornografi dan narkoba sudah sangat luar biasa merusak moral masyarakat. Karena pornografi, betapa banyak generasi muda bangsa ini yang hamil di luar nikah. Demikian pula karena narkoba, betapa banyak generasi muda yang rusak fisik dan mentalnya, bahkan banyak yang gila dan mati. Wajarlah kalau pengedar narkoba yang telah merusak jutaan masyarakat diberi hukuman mati.

Berbagai usaha sudah dilakukan pemerintah dan tokoh-tokoh agama sebagai solusi untuk menghadapi bahaya pornografi. Di antaranya memblokir situs-situs porno sebagai langkah awal untuk membendung maraknya pornografi. Tidak kalah pentingnya usaha yang dilakukan oleh juru dakwah (daíi) yang melakukan komunikasi lewat pendekatan agama. Sebab dalam ajaran agama sudah jelas keterlibatan dalam pornografi adalah suatu kemaksiatan. Apalagi akibat dari pornografi tersebut mendorong terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Persoalannya sekarang, dalam menilai banyaknya putra-putri bangsa yang terjerumus pada pornografi tentu tidaklah semata pada sisi benar atau salah. Perlu ada penilaian yang jernih dan perenungan yang mendalam, tentang faktor penyebab krisis moral yang melanda kaum remaja saat ini. Tidaklah arif kalau kesalahan hanya ditimpakan kepada mereka karena saat ini mereka dilanda krisis moral yang memprihatinkan. Barangkali orangtua juga memiliki kesalahan karena kealpaan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak, sehingga anak-anak saat ini terjerumus pada krisis moral yang memprihatinkan. Apalagi orangtua tidak mampu mengontrol berbagai jenis HP yang dimiliki anak, dan bahkan ada situs-situs porno di dalamnya.

KR-JOKO SANTOSO

Padahal seandainya sejak dini orangtua menanamkan nilai-nilai agama kepada anak, maka mereka akan tumbuh dengan moral yang kuat, sehingga tidak mudah tergoda dengan tindakan-tindakan yang merusak moral. Diakui, betapa semakin dangkalnya saat ini penanaman nilai-nilai agama kepada anak, sehingga akhlak mereka pun dari waktu ke waktu semakin rapuh. Bahkan sopan santun anak-anak kepada orangtua dan juga guru di sekolah pun sepertinya sudah terkikis. Moral mereka semakin rusak lagi dengan maraknya pornografi yang menjerumuskan mereka pada pergaulan bebas(seks bebas).

Usaha yang dibuat pemerintah dengan memblokir situs-situs porno tentu patut didukung, namun hasilnya tidak akan bisa maksimal. Sebab seketat apa pun pemblokiran yang dilakukan, kalau moral sudah rusak tetap ada saja celah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pornografi dari media lain. Jadi solusi terbaik sesungguhnya adalah memblokir moral anak-anak dari kemaksiatan dengan menanamkan nilai-nilai agama. Ini tentu tidak hanya tugas orangtua di rumah, dan juga guru di sekolah, melainkan tugas bersama dari semua lapisan masyarakat, termasuk media massa. Seandainya para orangtua di rumah memiliki komitmen yang kuat untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak tentu mereka akan bisa berkembang dengan moral yang baik. Apalagi didukung oleh guru di sekolah, media massa dan juga lingkungan masyarakat, maka anak-anak pun akan berkembang dengan moral yang baik.

Pornografi dan narkoba saat ini sungguh sangat meresahkan masyarakat karena telah banyak menelan korban. Hampir setiap menit ada orang yang menjadi korban pornografi dan narkoba, sehingga menjadikan moral bangsa ini sangat terpuruk. Betapa sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa ini manakala generasi mudanya rusak karena pornografi dan narkoba. Ini tentu merupakan tantangan besar bangsa yang harus dihadapi bersama oleh segenap kelompok masyarakat. Perlu keseriusan dan kerja keras dalam menghadapi bahaya pornografi dan narkoba yang sudah kian banyak merusak generasi muda bangsa ini. Tugas berat ini tentu tidak hanya dibebankan pada pemerintah dan tokoh-tokoh agama, melainkan merupakan tugas bersama segenap komponen bangsa. Sejak dini, nilai-nilai agama harus ditanamkan pada anak, agar mereka bisa tumbuh dengan akhlak dan moral yang baik. ❑-d

*) ***Dr Hamdan Daulay MSi MA,***
Dosen Magister KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Menyoal Sampah Berbayar

Ashari Cahyo Edi

PEMERINTAH Kota Yogyakarta menguji coba sistem sampah berbayar (*pay-as-you-throw*) pada 29 Oktoberñ4 November 2024, yang diperpanjang pada 5 dan 7 November lalu. Selama uji coba, warga hanya menimbang sampah di depo. Retribusi berbasis berat akan diterapkan jika sistem ini kelak berlaku.

Secara konseptual, sistem sampah berbayar adalah manifestasi *government by market,* tatakelola pemerintahan berbasis mekanisme pasar (Kamarck, 2007). Dalam model ini, pemerintah menggunakan otoritasnya untuk menciptakan ìhargaî sampah guna membentuk perilaku bersampah yang rasional.

Uji coba ini bukan sekadar penjajakan kebijakan. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup bersama tim konsultan tengah mengkaji data berat, jenis sampah, dan retribusi dari uji coba tersebut. Hasilnya akan menjadi dasar rancangan peraturan daerah yang direncanakan dibahas pada 2025.

Kronisnya masalah sampah dan tata kelolanya yang buruk memang membutuhkan solusi drastis. Setelah berkali-kali darurat sampah mendera, langkah Pemkot ini patut diapresiasi. Tetapi, walau banyak studi di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan efektivitas sistem sampah berbayar dalam meningkatkan kesadaran warga, mengurangi sampah tak terpilah, dan menekan jumlah total sampah, telaah kritis tetap diperlukan sebagai perspektif sandingan.

Pertama, cara mempermasalahkan (Bacchi, 2009) sampah dalam sistem ini mengasumsikan bahwa keputusan individu terkait perilaku konsumsi adalah penyebab utama masalah sampah. Padahal, dari mandi hingga makan malam, pilihan produk yang minim sampah kertas, plastik, atau *styrofoam* sangat terbatas. Artinya, cara seseorang bersampah dipengaruhi oleh beragam faktor eksternal yang dibentuk oleh lingkungan kebijakan publik. Karena itu, fokus penyelesaian masalah sampah di level individu sejatinya kurang tepat sasaran.

Yang lebih mendesak adalah pemeliharaan kebijakan (*policy maintenance)* untuk menciptakan lanskap kebijakan (*policyscape*) yang membentuk perilaku hidup, pola produksi, dan seterusnya dalam kerangka ekonomi sirkular (Mettler, 2016). Agar beragam kebijakan publik baik yang langsung terkait sampah maupun tidak, dapat saling berinteraksi menghasilkan praktik kehidupan yang berwawasan lingkungan. Sayangnya, tanpa disadari, ide sampah berbayar justru menggeser lokus tanggung jawab dalam pemeliharaan kebijakan ini dari para pembuat kebijakan.

Kedua, memproblematisasi sampah sebagai masalah individu berisiko mengalihkan perhatian dari akar politik krisis sampah. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan inovasi, teknologi, edukasi warga, dan insentif bagi produsen dan konsumen, yang membutuhkan kerja politik untuk menyepakati prioritas program dan anggaran serta pengerahan sumber daya publik lainnya. Ironisnya, setiap kali krisis sampah berulang, berulang pula kegagalan eksekutif dan legislatif di daerah maupun pusat membangun konsensus politik.

Ide sampah berbayar berisiko mengubah cara orang memahami masalah sampah. Masalah sampah, yang semula politis sebagai kompetisi dan kontestasi kebijakan, berisiko menjadi apolitis, sekadar persoalan keputusan individual dalam pengelolaannya (Strach, 2016). Dengan kata lain, gagasan ini berisiko mendepolitisasi pengelolaan sampah.

Terakhir, sistem sampah berbayar mengandung dilema akuntabilitas terkait prinsip etis keadilan. Sistem ini mengandalkan mekanisme pasar, di mana warga diharapkan bertindak rasional dengan memilah dan mengurangi sampah. Jika keberhasilan hanya diukur dari berkurangnya volume sampah, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi warga rentan/miskin yang terbatas daya belinya.

Ketika sistem ini tidak berlaku di sekitar Kota Yogyakarta dan perbedaan ìhargaî sampah terlalu besar, risiko *illegal dumping* akan meningkat. Warga rentan/miskin yang membuang sampah sembarangan berisiko dihukum denda dan stigma sosial (Schneider & Ingram, 1997). Alhasil, sistem ini menciptakan dilema akuntabilitas: antara keberhasilan yang diukur dari berkurangnya volume sampah *versus* keberhasilan yang diukur dari kinerja keadilan sistem dalam memberi perlakuan terhadap khusus warga rentan/miskin.

Memungkas tiga telaah kritis di atas, saat ini kiranya terlalu dini untuk menerima atau menolak gagasan sampah berbayar. Analisis ini bertujuan meningkatkan literasi warga dan memperkaya wacana publik tentang kebijakan persampahan. Kebijakan yang didiskusikan dan diuji secara publik, serta disesuaikan dengan konteks lokal, cenderung lebih mudah diterima masyarakat dan mendapatkan legitimasi politik yang kuat. ❑-d

*) ***Ashari Cahyo Edi SIP MPA MA,***
Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Pojok KR

KPK periksa Yasonna, babak baru kejar Harun Masiku.
-- Asal punya keberanian.

***

Lima napi Bali Nine tiba di Australia.
-- Indonesia hanya bisa memantau.

***

Takluk dari Vietnam 0-1, Indonesia turun ke posisi kedua.
-- Tetap semangat, masih berpeluang raih poin.

Berabé